

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### V.1. Kesimpulan

1. Ada berbagai bentuk perubahan sosial yang ditimbulkan dengan kehadiran P4T. Dari sisi struktur agraria, di masa sebelum kelahiran gerakan petani masyarakat di daerah penelitian umumnya tidak memiliki cukup lahan untuk dikelola. Bahkan, sebagian adalah masyarakat tidak bertanah (tunakisma). Sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Intervensi gerakan sosial menyebabkan perubahan pada struktur agraria saat ini. Perubahan yang nampak adalah dari indikator penguasaan tanah setelah tanah direklaim, didistribusikan dikelola oleh keluarga petani. Namun, perubahan struktur agraria tersebut ternyata belum signifikan. Ini disebabkan karena tanah-tanah yang dibagi tidak luas sehingga belum mampu merubah secara signifikan taraf kehidupan petani. Dua indikator yang digunakan untuk mengukurnya adalah standar hidup layak yang ditetapkan oleh pemerintah dan struktur sosial secara umum. Dengan dua indikator tersebut, struktur agraria yang baru belum membawa perubahan berarti terhadap kesejahteraan masyarakat petani. Akan tetapi, dari sisi lain penggarapan tanah ini telah membawa perubahan. Sebab, sebagai upaya menegakkan harga diri bahwa sebagai petani harus mempunyai tanah situasi ini telah tercipta. Disamping terbuka peluang baru yang berpotensi membantu perbaikan taraf ekonomi masyarakat melalui kerja samanya dengan pihak lain. Kehadiran P4T selain menyebabkan perubahan pada struktur agraria juga mendorong bentuk-bentuk perubahan sosial lain di desa. Interaksi antara organisasi dan partisipannya, pihak Perkebunan swasta, otoritas lokal dengan masyarakat lain sekitar menimbulkan dampak-dampak sosial baik. Struktur agraria baru merupakan preferensi sosial yang direncanakan namun terdapat sejumlah perubahan lain menyangkut pola interaksi dan komunikasi diantara para pihak terlibat yang merupakan dampak tidak langsung. Hubungan sosial baru

diukur dengan ikatan sosial, ketegangan dan dukungan antar aktor yang dipetakan dalam penelitian. Yang positif adalah menguatnya ikatan sosial didalam organisasi yang berbeda dengan hubungan antara partisipan organisasi dengan masyarakat non-anggota. Yang cukup riskan adalah kekakuan hubungan dengan tokoh-tokoh di desa meskipun tidak nampak secara terbuka. Ditengarai bahwa kelahiran tokoh-tokoh baru yang kritis dari organisasi melemahkan pamor tokoh-tokoh lama. Disamping itu etegangan baru juga muncul dalam hubungan antara "orang" PT. Tratak yang berusaha mengambil kembali lahan.

2. Mobilisasi dilakukan oleh P4T dalam kerangka hubungannya dengan FPPB. Keanggotaannya dalam FPPB memungkinkan P4T memiliki akses terhadap konstituen. Pada awalnya mobilisasi berjalan spontan dan cenderung tidak terencana. Disimpulkan demikian karena pada awal masuknya dukungan dari *conscience constituency* lebih utama disebabkan karena rasa empati terhadap gerakan petani. Namun dalam perjalanannya dengan perkembangan kesadaran organisasi, mobilisasi sumber daya mulai terpetakan. Mobilisasi diarahkan pada pihak-pihak yang mendukung strategi organisasi untuk perubahan struktural. Tipe sumber daya yang digalang bersumber dari konstituen yang memiliki sumber daya untuk fasilitasi dan mediasi penyelesaian konflik. Wujudnya berupa materil maupun non materil.

Setelah lahan digarap, sumber daya yang penting untuk dimobilisasi adalah aset dalam wujud kapital untuk memulai produksi yang bersifat ekonomis. P4T membuktikan dengan kerja samanya dengan konstituen yang relevan.

3. Mobilisasi yang dikembangkan saat ini memiliki keterkaitan dengan tujuan perubahan seperti yang diharapkan. Secara logis bahwa mobilisasi dilakukan mempercepat pencapaian tujuan perubahan yang diharapkan. Model mobilisasi yang dikembangkan saat ini telah memungkinkan gerakan untuk mengambil tindakan inovatif dan mengembangkan kesadaran baru tentang organisasi. Meskipun demikian, model mobilisasi yang dikembangkan saat ini belum secara signifikan menjadi akselerator dalam pencapaian tujuan perubahan yang

diharapkan oleh P4T. Kesimpulan ini diambil dengan menyandingkan antara panjangnya upaya yang telah ditempuh untuk perubahan struktural dengan dinamika mobilisasi yang berlangsung marak.

## V.2. Rekomendasi

1. Para penggarap di P4T hendaknya merubah tatacara pengelolaan tanah mereka di tanah perkebunan PT.Tratak. Selama ini pengusahaan tanah oleh 480 petani penggarap di lahan perkebunan adalah dengan cara membagi habis semua lahan tersebut secara merata. Dengan cara ini, setiap KK petani hanya memperoleh kurang dari seperempat hektar tanah ( $\pm 0,19$ ). Tanah-tanah tersebut dikelola oleh masing-masing keluarga petani dengan menanam padi, singkong dan jagung. Hasilnya selain dikonsumsi sendiri juga dijual langsung oleh petani. Model pengusahaan ini tidak mendukung pada usaha memajukan proses pengusahaan tanah tersebut sehingga menjauh dari teknologi dalam meningkatkan produktifitas tanah. Dengan luasan tanah yang sangat terbatas, model pengelolaan berbasis keluarga tidak mampu mengoptimalkan hasil lahan. Menurut perhitungan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) luas tanah kering yang layak minimal 2 hektar lahan kering atau 1 hektar sawah irigasi teknis untuk menghidupi 1 KK petani. Dengan luas tanah yang dibagi, jumlahnya jauh dari mencukupi. Sehingga perlu diupayakan menemukan model pengusahaan lain yang lebih efektif
- Penelitian ini merekomendasikan kepada P4T agar dapat mengusahakan bentuk pengelolaan kolektif lahan-lahan ini. Langkah P4T untuk bekerja sama dengan Departemen Kehutanan untuk penanaman tanaman keras disebagian besar lahan bernilai positif. Namun masih terdapat peluang ekonomis dari lahan seluas 25 Ha yang digarap oleh 125 KK diluar lahan tanaman keras. Pengelolaan kolektif merupakan upaya menyatukan pengelolaan tanah kedalam satu unit usaha produksi yang terdiri dari keluarga-keluarga petani. Disamping itu dimaksudkan untuk membangun cara pandang kolektif terhadap fungsi sosial tanah. Lahan yang ada dikelola secara terintegrasi dengan perencanaan tata produksi yakni dengan melakukan berapa diversifikasi usaha seperti peternakan yang dapat

menjadi pemasok pupuk dan pestisida organik. Model pengusahaan bersama ini diperkirakan akan mendapatkan keberatan dari petani, sebab petani secara psikologis akan merasa nyaman dengan memiliki lahan yang dikuasai secara pribadi. Juga, dengan kepemilikan pribadi petani dapat menjualnya jika sewaktu-waktu membutuhkan tanah tanpa ada yang menghalangi. Jika psikologi ini terus berkembang ditengah situasi ekonomi yang memarjinalkan petani dan pertanian, maka tanah-tanah perkebunan Tratak dapat terkonsolidasi kembali ketangan para pemilik modal. Oleh sebab itu, tata cara pengusahaan tanah secara modern sangat patut dikembangkan misalnya melalui model Badan Usaha Bersama Milik Petani dengan karakter koperasi.

Untuk pengelolaannya, P4T bisa memfungsikan dirinya untuk memberi penyadaran bahwa kondisi yang sama akan terus dihadapi jika model pengelolaan terpadu tidak diupayakan. Model pengelolaan lahan secara bersama seharusnya menjadi agenda kegiatan organisasi yang direncanakan secara sistematis. Orientasi Gerakan sosial petani memungkinkan untuk diperluas untuk tujuan ekonomi produktif. Apalagi jika tanah telah kembali dikuasai, kecenderungannya dinamika organisasi mengalami pelambatan karena tujuan jangka pendek organisasi telah dicapai.

Langkah-langkah kongkrit yang direkomendasikan adalah menyusun perencanaan bersama seluruh anggota untuk tata kelola lahan, membangun aliansi dengan pihak-pihak strategis misalnya Dinas Pertanian, kelompok tani lain yang melakukan upaya produksi bersama, membangun akses ke sumber-sumber permodalan dll. Semua proses diharapkan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi didalamnya. Rencana bersama mencakup aspek-aspek untuk pengelolaan bersama seperti pola penanaman, pembagian hasil, sumber permodalan, struktur pengelola lahan dll.

Gagasan dasar terkait dengan rekomendasi model pengelolaan kolektif ini disampaikan dalam bagian terpisah dari bab ini.

2. Dukungan terhadap P4T seyogyanya tidak hanya digalang dari *beneficiaries* yang berasal dari anggota namun namun juga dukungan dari masyarakat sekitar desa/dusun. Untuk menjaga agar eksistensi organisasi tetap terjaga ditengah masyarakat desa, perlu upaya untuk menjaga agar gerakan petani tidak bersifat eksklusif. Perubahan sosial yang muncul sebagai dampak hendaknya diposisikan sebagai bahan refleksi terhadap strategi organisasi dari sisi dampak sosial kehadiran P4T. Cara penilaiannya bisa dilakukan dengan mengkonfrontasikan dampak sosial dari gerakan petani terhadap tujuan utama yakni struktur agraria yang berkeadilan.
3. Gerakan petani hendaklah menjadi gerakan yang berporos pada basis kekuatan petani. Setiap tindakan organisasi harus memenuhi prinsip-prinsip yang memberdayakan petani dengan membangun kapasitas petani secara mandiri. Mobilisasi sumber daya dalam bentuk dukungan dari *conscience constituency* sangat dibutuhkan untuk memberi wawasan, mendapatkan dukungan moril, finansial dan membangun kesadaran tentang hak-hak dasar petani, namun kendali gerakan seharusnya dipegang oleh petani. Belakangan, tercurahnya perhatian publik pada gerakan petani menyebabkan masuknya tokoh-tokoh baru yang tertarik dan peduli kedalam lingkaran organisasi. Dalam pandangan positif bisa memperkuat gerakan petani. Namun sikap kritis harus dibangun untuk menjaga kualitas gerakan dengan mencegah masuknya berbagai kepentingan dan pihak-pihak yang berupaya mengambil kesempatan (oportunis) dari perjuangan petani. Karenanya, perlu bagi P4T untuk memformulasi ulang model mobilisasi yang tepat.

### **V.3. Implikasi Teoritis**

Teori tentang mobilisasi oleh gerakan sosial menunjukkan kecenderungan yang sama. Asumsi yang digunakan adalah bahwa gerakan sosial lah yang memegang kendali kolektif atas sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya tujuan gerakan. Dengan demikian, gerakan sosial sepenuhnya leluasa untuk memilih

sumber daya yang dibutuhkan dan menentukan bagaimana sumber daya akan digunakan dikelola.

Konsep tentang konstituen dalam teori mobilisasi sumber daya dinyatakan sebagai sumber daya sumber daya dan kelompok ini lah yang menjadi target mobilisasi.

Melalui pendalaman model mobilisasi yang dikembangkan oleh gerakan sosial dalam penelitian ini, asumsi yang dibangun oleh teori mobilisasi mengalami pergeseran. Konstituen diasumsikan sebagai "pasif" sementara gerakan sosial aktif. Padahal dalam kasus penelitian, menunjukkan bahwa konstituen tertentu justru mengindikasikan pengaruh yang kuat terhadap gerakan. Konstituen memiliki minat dan kepentingannya masing-masing dan juga melakukan upaya-upaya tertentu untuk menjalankan kepentingannya.

Implikasinya adalah memperbaiki cara pandang tentang konstituen dalam gerakan sosial. Konstituen berinteraksi secara resiprokal dengan gerakan. Gerakan berpotensi menggandeng konstituen untuk mendukungnya mencapai tujuan namun sebaliknya konstituen juga memiliki potensi yang sama untuk memobilisasi gerakan untuk kepentingannya.

#### **V.4. Implikasi Praktis**

Model mobilisasi yang dikembangkan oleh gerakan sosial seyogyanya mempertimbangkan efektivitasnya terhadap pencapaian tujuan perubahan yang diharapkan. Perihal ini menjadi penting karena seyogyanya mobilisasi berbanding lurus dengan akselerasi tindakan untuk pencapaian tujuan. Untuk mengetahui potensi efektifnya, gerakan sosial dituntut untuk mampu melakukan seleksi konstituen dengan melihat relevansi antara tujuan perubahan yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh konstituen. Karena dengan demikian, percepatan pencapaian tujuan perubahan bisa diharapkan terwujud.

Perihal lain bahwa studi mobilisasi dan perubahan sosial ini juga menunjukkan bagaimana pilihan strategi perlawanan yang dilakukan oleh gerakan sosial. Seperti umumnya, P4T juga memilih upaya struktural dan non struktural untuk menyelesaikan konflik perebutan lahan. Upaya struktural ditempuh melalui dengan

lobi, negosiasi dalam agenda-agenda pertemuan dengan perangkat daerah dan sektoral terkait seperti pemerintah daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten, BPN Kabupaten dan Wilayah hingga pada tingkat pusat. Upaya non struktural mencakup penggerakan massa untuk mendesak penyelesaian konflik dengan yang terutama mempertimbangkan kepentingan petani.

Pilihan dua pendekatan untuk memperjuangkan penyelesaian kasus ini didasari dengan prinsip-prinsip damai dan anti kekerasan. Sikap ini diyakini dan ditanamkan dalam organisasi kepada seluruh anggotanya. Sehingga meskipun melakukan penggerakan massa secara besar-besaran, tidak terjadi tindakan yang anarkis oleh petani.

Dari prinsip demikian, penelitian ini menawarkan satu model perlawanan yang bisa digunakan. Yakni dengan memanfaatkan peluang penyelesaian secara struktural yang semakin terbuka dan secara paralel melakukan penggerakan massa sebagai upaya penekan. Namun dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip anti kekerasan.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	101
V.1. Kesimpulan .....	101
V.2. Rekomendasi .....	103
V.3. Implikasi Teoritis .....	105

